

PERIODE KLASIK

Nama Mandailing diyakini berasal dari kata “ Mandala – Holing”, mengacu pada suatu kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad Membentang mulai dari Padang Hukum Sampai daerah paling Selatan provinsi Sumatera Barat atau kawasan yang termasuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Sebutan "Mandala Holing" juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing yaitu "Surat tumbaga holing naso rasasa" (aturan adat yang tidak bisa dihapus). Sebutan Holing sering dikaitkan dengan nama Holing Nama itu tercatat dalam kekuasaan Dinasti Tang yang memerintah di Cina tahun 618 - 906 Msehi. Disebutkan juga bahwa, sekalipun di bawah otoritas Dinasti tang di Cina, Pemerintahannya berpusat di Jawa, yaitu kerajaan Kalingga di Pesisir Utara Jawa. Kata Mandailing disebutkan pertama kali dalam buku "Nagarakertagama". Buku itu ditulis oleh Mpu Prapanca di masa pemerintahan Majapahit. Buku itu menceritakan tentang adanya ekspedisi utusan kerajaan Majapahit ke wilayah Sumatera pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1365 Masehi.

PERIODE KERAJAAN

Catatan penting Mandailing baru muncul dalam naskah "Pararaton" (1336 Masehi) yang ditulis dalam teks Jawa pertengahan. Naskalah itu menyebutkan bahwa di Sumatera terdapat Lima kerajaan penting, salah satunya adalah kerajaan Aru, yang telah berdiri pada tahun 1295 Masehi. Kawasan Mandailing Natal diyakini di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan tersebut sepanjang abad ke-13 hingga 15 Masehi Kerajaan Mandailing yang otonom diyakini baru terbentuk beberapa abad kemudian yang ditandai dengan kekuasaan Pulungan yang pertama. Setelah itu, klan marga Nasutio juga mendirikan kerajaan besar yang menguasai kawasa Mandailing Godang. Lalu klan marga Lubis juga mendirikan kerajaan di kawasan Mandailing Julu. Kedua kerajaa penting itu, Nasution dan Lubis memerintah secara otonomi.

PERIODE KOLONIALISME

Perang Pader yang berpusat di Minangkabau mendorong instabilitas pemerintahan di daerah Mandailing, sebab sebagian pasukan Paderi juga berasal dari pasukan pesantren yang disuplai daerah Mandailing dan Natal. Untuk memblokir perluasan perang Paderi ke arah Utara, Belanda lalu masuk ke Mandailing. Maka berdirilah asisten Residen Angkola Mandailing tahun 1840, sebuah pemerintahan kolonial yang berpusat di Panyabungan, di bawah Gubernur Sumatera. Pemerintahan ini enandai masuknya penjajahan di kawasan ini, sekaligus

nengabrasi otoritas raja - raja Mandailing. Tahun 1857 wilayah Mandailing, Angkola, dan Sipirok disatukan dalam keresidenan Air Bangis. Tahun 1885 keresidenan Mandailing Natal terbentuk dan beribukota di Padangsidempuan. Tahun 1906 pusat Pemerintahan Residen Mandailing Natal dipindahkan dari Padangsidempuan ke Sibolga, dan berubah menjadi Karesidenan Tapanuli, yang termasuk di dalamnya afdeeling Sibolga dan Bataklanden. Natal disiapkan menjadi kota pelabuhan penting untuk ekspor komoditis perkebunan. Selain karena telah menjadi pelabuhan dagang penting bagi bangsa Cina, Arab, Portugis, India dan Inggris sejak ratusan tahun sebelumnya, Muara Singkuang dan Natal juga menghubungkan sungai-sungai besar di Mandailing. Sungai - sungai besar itu selain menjadi sumber pertanian dan perkebunan, juga menjadi sarana lalu lintas jalan sebelum dibangunnya Jalan Pos Mandailing - Air Bangis tahun 1901. Karena itu tahun 1840 Multatuli mendarat di Natal sebagai Controlir Natal.

PEMBENTUKAN KABUPATEN

Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah hasil perekaran Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada Tahun 1992, Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Sumatera Utara memutuskan pemekaran Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara. Prioritas utama pemekaran wilayah itu adalah pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal. Pada tanggal 23 November 1998, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan UU, No 12 Tahun 1998 yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, dan secara resmi diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998, Kabupaten Mandailing Natal yang dikenal dengan sebutan MADINA, terdiri dari 8 (delapan) kecamatan.

Pada tanggal 29 Juli 2003, Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 tentang pembentukan kecamatan dan Peraturan Daerah No. 8 tentang pemekaran desa di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 dan 8 tersebut maka Kabupaten Mandailing Natal memiliki 17 kecamatan yang terdiri dari 322 desa dan 7 kelurahan. Pada tanggal 15 Februari 2007 Kabupaten Mandailing Nat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mandaili Natal, Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Puncak Sorik

Marapi, Kecamatan Pakantan dan Kecamatan Sinunukan sehingga Kabupaten Mandailing Natal memiliki 22 kecamatan dengan jumlah desa seban, 349 desa dan 32 kelurahan.

Pada tanggal 7 Desember 2007 Kabupaten Mandailing N; mengeluarkan Peraturan Daerah No.45 Tahun 2007 Peraturan Daerah No. 46 Tahun 2007 tentang Pemecahan Desa dan Pembentukan Kecamatan Naga Juang yang mencakup Desa tambiski, Tarutung Panjang, Humbang I, Sayur Matua, Banua Rakyat,banua Simanosor, dan Tambiski Nauli menambah jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Mandailing Natak menjadi 23 kecamatan, 27 kelurahan dan 377 desa.